

## Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis

### *Gender Equality in Indonesian Education: A Philosophical Review*

**Ninik Uswatun Fadilah**

*Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja*  
ninik.tik2020@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.47655/widyadewata.v9i1.261>

Diterima: 9 Pebruari 2026 | Direvisi: 9 April 2026 | Disetujui: 30 Juni 2026

### **Abstrak**

Kesetaraan gender menjadi salah satu prinsip fundamental dalam pembangunan pendidikan yang berkeadilan. Namun, terdapat laporan dan penelitian yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih ada dalam sistem pendidikan di Indonesia, baik dalam kurikulum, budaya sekolah, maupun praktik pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat masalah kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia dari sudut pandang filsafat pendidikan dan mengidentifikasi bentuk ketidaksetaraan yang ditemukan dalam literatur saat ini, serta membangun implikasi teoretis dan praktis untuk mengembangkan pendidikan yang berkeadilan gender. Metode literatur review digunakan untuk menelaah buku, artikel ilmiah, dan kebijakan pendidikan terkait gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat pendidikan terutama humanisme, feminisme, progresivisme, dan pendidikan kritis memberikan landasan konseptual yang kuat untuk menelaah ketidaksetaraan gender sebagai masalah moral, sosial, dan struktural. Ketimpangan gender muncul dalam representasi pada buku teks, stereotip kurikulum, kesenjangan partisipasi pembelajaran, bias interaksi guru siswa, dan budaya sekolah yang masih dipengaruhi norma patriarki. Meskipun belum diterapkan secara merata, berbagai strategi pendidikan seperti kurikulum merdeka, pengarusutamaan gender, pelatihan guru, dan pendekatan multikultural kritis dianggap memiliki potensi untuk memperkuat keadilan gender di sekolah. Kajian ini menekankan bahwa perubahan filosofis, pedagogis, dan struktural yang berkelanjutan harus dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan untuk mencapai pendidikan berkeadilan gender.

**Kata kunci:** Bias gender; Filsafat Pendidikan; Kesetaraan gender; Kurikulum; Pendidikan Indonesia.

### **Abstract**

*Gender equality is one of the fundamental principles in the development of equitable education. However, there are reports and studies that show that gender inequality still exists in the education system in Indonesia, both in curriculum, school culture, and learning practices. The purpose of this study is to look at the issue of gender equality in education in Indonesia from the perspective of educational philosophy and identify forms of inequality found in the current literature, as well as build theoretical and practical implications for developing gender-equitable education. The literature review method is used to review books, scientific articles, and gender-related education policies. The results of the study show that the philosophy of education, especially humanism, feminism, progressivism, and critical education, provides a strong conceptual foundation for examining gender inequality as a moral, social, and structural problem. Gender inequality appears in the representation in textbooks, curriculum stereotypes, learning participation gaps, student teacher interaction biases, and school culture that is still influenced by patriarchal norms. Although not yet applied evenly, various educational strategies such as an independent*

*curriculum, gender mainstreaming, teacher training, and critical multicultural approaches are considered to have the potential to strengthen gender justice in schools. This study emphasizes that sustainable philosophical, pedagogical, and structural changes must be carried out simultaneously and sustainably to achieve gender-equitable education.*

**Keywords:** *Curriculum, Gender Bias, Gender Equality, Indonesian Education, Philosophy of Education*

## **Pendahuluan**

Salah satu elemen penting dalam membangun masyarakat yang berkelanjutan dan adil adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan agenda strategis dalam pembangunan pendidikan baik secara global maupun nasional. Komitmen terhadap kesetaraan gender tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas dan tujuan 5 tentang kesetaraan gender (United Nations, 2015). Namun, tantangan terhadap diskriminasi dan kesetaraan gender masih menjadi isu yang kompleks, melibatkan norma budaya, stereotip, dan struktur sosial di masyarakat. Ketimpangan ini sering terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai sektor, salah satunya adalah pendidikan (Tue et al., 2024). Di Indonesia sendiri, keadilan dan kesetaraan gender mulai diperjuangkan sejak masa R.A. Kartini, di mana emansipasi menjadi ujung tonggak kebebasan perempuan Indonesia untuk mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki (Sulistiyowati, 2020).

Realitas di berbagai komunitas menunjukkan bahwa kaum perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang setara, seperti norma sosial yang bias gender, praktik diskriminatif dalam lingkungan belajar, keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan, serta stereotip yang membatasi pilihan bidang studi. Meskipun berbagai intervensi pemerintah dan organisasi telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan, disparitas gender tetap terlihat, terutama dalam kualitas pengalaman belajar dan keterwakilan di bidang STEM (Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika) (Muhammad, 2025). Bahkan, peningkatan partisipasi perempuan di pendidikan tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran dalam pengalaman akademik dan capaian hasil belajar, yang tercermin dari adanya bias interaksi di kelas, rendahnya rasa percaya diri dalam bidang tertentu, serta keterbatasan akses terhadap peluang pengembangan akademik dan profesional (Yuspiani et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender tidak hanya berkaitan dengan akses dan partisipasi, tetapi juga dengan proses dan hasil pendidikan, sehingga menuntut transformasi kurikulum yang mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis. Integrasi tersebut mencakup pengembangan konten pembelajaran yang inklusif gender, penggunaan pedagogi yang responsif terhadap kebutuhan beragam peserta didik, serta penciptaan lingkungan belajar yang adil dan bebas bias, guna memastikan tercapainya keadilan pendidikan secara substantif.

Apa yang dilakukan bangsa Indonesia sejak merdeka, sesungguhnya telah mengembangkan dan menerapkan desain kurikulum yang diarahkan pada perluasan akses yaitu semua peserta didik berkesempatan yang sama dalam mengikuti dan memperoleh pengalaman belajar secara optimal atas dasar azas kemanusiaan dan berkeadilan. Kurikulum merdeka merupakan terobosan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan fokus utama pada penguatan karakter dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Namun demikian, berbagai temuan menunjukkan bahwa praktik kekerasan di lingkungan sekolah

termasuk perundungan dan kekerasan seksual masih terjadi dan berdampak pada seluruh peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, perspektif gender tetap relevan karena bentuk kerentanan, dan dampak kekerasan sering kali tidak dialami secara setara. Sejumlah studi menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap kekerasan seksual dan pelecehan berbasis relasi kuasa, sementara laki-laki cenderung menghadapi tekanan maskulinitas yang mendorong keterlibatan dalam perilaku agresif atau enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya (UNESCO, 2019); (Bodin, 2020). Data nasional sebanyak 202 peserta didik menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah mengindikasikan perlunya perhatian serius pada satuan pendidikan, tidak hanya dari aspek perlindungan, tetapi juga dari sisi pencegahan melalui pendidikan (Maela, 2024). Dengan demikian, integrasi perspektif gender dalam kurikulum menjadi penting, bukan semata untuk membedakan laki-laki dan perempuan sebagai korban, melainkan untuk membangun kesadaran kritis terhadap relasi kuasa, norma sosial, dan stereotip gender yang dapat memicu terjadinya kekerasan. Kurikulum yang responsif gender diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan adil bagi seluruh peserta didik.

Prinsip kesetaraan gender di Indonesia menjadi bagian integral dari berbagai regulasi kebijakan nasional, seperti Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengadvokasi kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi, namun implementasinya sering terhalang oleh hambatan budaya dan stereotip gender (Adib & Nurwahidah, 2024); (Anastasia et al., 2024); (Larasati & Ayu, 2020). Stereotipe gender yang tidak disadari menimbulkan ketimpangan struktural maupun kultural. Oleh karena itu analisis terhadap kesetaraan gender tidak cukup hanya menggunakan pendekatan empiris, tetapi perlu dilengkapi dengan perspektif filosofis untuk menalar akar ketidakadilan, memahami relasi kuasa, dan merumuskan arah transformasi pendidikan.

Filsafat Pendidikan berperan strategis dalam memberikan kerangka konseptual untuk mengkaji bias gender. Pendekatan seperti humanisme, progresivisme, kritisisme, hingga feminisme memberikan dasar reflektif dalam memahami nilai, norma, dan asumsi yang melandasi praktik pendidikan. Dalam konteks Pendidikan Indonesia, kajian literatur yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender dengan perspektif filsafat pendidikan masih sangat terbatas. Banyak penelitian lebih menekankan aspek kebijakan atau fenomena empiris tanpa analisis filosofis yang mendalam. Gap inilah yang menjadikan kajian ini penting dan relevan untuk dilakukan.

Dengan paparan ini, penulis akan menjabarkan mengenai kesetaraan gender dalam lingkup Pendidikan Indonesia. Metode dan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan literatur yang bertujuan menganalisis kesetaraan gender dalam Pendidikan Indonesia melalui lensa filsafat pendidikan. Pembahasan akan mencakup analisis bentuk interpretasi fenomena ketidaksetaraan gender menggunakan teori-teori filsafat pendidikan serta merumuskan implikasi filosofis pedagogis bagi pengembangan pendidikan berkeadilan gender di Indonesia. Dengan memahami peran strategis pendidikan, pendekatan filosofis ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu gender sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan pendidikan inklusif, egaliter, dan berkeadilan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review (LR), yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk melihat berbagai kajian teoritis dan temuan penelitian yang relevan tentang isu kesetaraan gender dalam pendidikan Indonesia melalui perspektif filsafat pendidikan. Metode ini dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis

berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian secara menyeluruh sehingga peneliti memiliki pemahaman yang luas tentang masalah yang dibahas (Snyder, 2019).

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

#### **1. Pencarian Literatur**

Pengumpulan data literatur dari basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus dan ResearchGate dengan menggunakan kombinasi kata kunci: “gender equality in education”, “kesetaraan gender”, “philosophy of education”, “curriculum and gender”, serta “filosofi pendidikan dan gender”. Hasil pencarian awal memperoleh 38 artikel yang relevan dengan topik penelitian.

#### **2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi**

Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan (*screening*) berdasarkan kriteria inklusif dan eksklusif. Kriteria inklusif mencakup: (1) memiliki keterhubungan langsung dengan konsep gender dalam pendidikan, filsafat pendidikan, teori gender, atau pedagogi kritis, (2) fokus pada konteks Indonesia atau memiliki relevansi teoritis untuk konteks Indonesia, (3) publikasi lima tahun terakhir untuk memastikan akuntabilitas data (2020-2025), terindeks di data base ilmiah dan tersedia dalam teks lengkap. Adapun kriteria eksklusif meliputi artikel populer/non-ilmiah, studi gender di luar bidang pendidikan, artikel yang tidak memiliki relevansi tematik, atau bersifat opini tanpa dukungan empiris

#### **3. Review Artikel**

Artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi selanjutnya dianalisis secara sistematis. Dari hasil proses seleksi, diperoleh sebanyak 12 artikel yang kemudian ke tahap review mendalam. Proses review dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) penelaahan abstrak dan kesimpulan untuk memastikan kesesuaian fokus kajian, (2) pembacaan penuh (*full-text reading*) untuk mengidentifikasi kerangka teoritis, metodologi, serta temuan utama, dan (3) ekstraksi data menggunakan format analisis yang mencakup identitas penulis, tahun publikasi, konteks penelitian, pendekatan metodologis, serta kontribusi terhadap kajian gender dan filsafat pendidikan.

### **Alur Analisis Data**

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan kualitatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis menggunakan teknik tematik. Prosedur analisis data dimulai melalui tiga tahapan: (1) mereduksi literatur, mengumpulkan data yang relevan dan berhubungan dengan tema penelitian; (2) koding tematik, mengkategorikan data yang terkumpul untuk menentukan pola, kategori, dan tema utama, seperti bias gender dalam pendidikan, perspektif filosofis, akar ketidaksetaraan gender dan implikasi filosofis bagi pendidikan Indonesia; (3) sintesis integratif, temuan literatur dikaitkan dengan teori-teori filsafat pendidikan untuk membangun argumen filosofis.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Isu kesetaraan gender dalam pendidikan Indonesia memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan banyak faktor seperti: kurikulum, budaya sekolah, interaksi pedagogis dan konstruksi sosial, yang semuanya dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Berikut adalah ulasan dari 12 jurnal temuan dalam Tabel 1. Hasil Kajian Literatur

Tabel 1. Hasil Kajian Literatur

| No | Penulis (Tahun)          | Negara                    | Metode             | Fokus Kajian                            | Temuan Utama                                                                                                       | Relevansi                                                                |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Akmatalieva (2022)       | Internasional (Kirgistan) | Studi konseptual   | Kesetaraan gender dalam pendidikan      | Ketimpangan gender masih ada meskipun ada kemajuan; diperlukan filosofi pendidikan yang menjamin kesempatan setara | Menguatkan urgensi landasan filosofis kesetaraan gender dalam pendidikan |
| 2  | Madale et al. (2025)     | Internasional (Argentina) | Literature review  | Tantangan dan inovasi kesetaraan gender | Kesetaraan gender dipengaruhi faktor budaya, institusi, dan teknologi; perlu pendekatan sistemik                   | Dasar konseptual integrasi gender dalam kurikulum dan kebijakan          |
| 3  | Adib & Nurwahidah (2024) | Indonesia                 | Kualitatif         | Gender dan HAM dalam pendidikan         | Kebijakan sudah ada namun implementasi belum optimal karena hambatan sosial-budaya                                 | Menunjukkan gap implementasi kebijakan gender di pendidikan Indonesia    |
| 4  | Larasati & Ayu (2020)    | Indonesia                 | Studi normatif     | Gender dan HAM dalam pendidikan         | Diskriminasi gender masih terjadi; hukum saja tidak cukup                                                          | Menguatkan pentingnya perubahan paradigma sosial dan pendidikan          |
| 5  | Yuspiani et al. (2023)   | Indonesia                 | Studi kasus        | Gender di pendidikan tinggi             | Kesenjangan gender masih terjadi dalam pengalaman akademik mahasiswa                                               | Menunjukkan ketimpangan pada level pengalaman belajar                    |
| 6  | (Azizah, 2023)           | Indonesia                 | Kualitatif         | Gender dan budaya patriarki             | Budaya patriarki menghambat kesetaraan gender                                                                      | Menguatkan faktor kultural sebagai penyebab ketimpangan                  |
| 7  | Missa et al. (2021)      | Indonesia                 | Kualitatif         | Keadilan gender di sekolah              | Bias gender dalam kebijakan dan budaya sekolah merugikan perempuan                                                 | Menunjukkan ketidakadilan struktural dalam pendidikan                    |
| 8  | Anastasia et al. (2024)  | Indonesia                 | Studi konseptual   | Gender dalam perspektif Islam           | Islam mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan                                                                 | Menguatkan legitimasi normatif-religius kesetaraan gender                |
| 9  | Maela (2024)             | Indonesia                 | Analisis kurikulum | Kurikulum Merdeka dan gender            | Kurikulum Merdeka mengintegrasikan nilai kesetaraan gender                                                         | Relevan dengan pengembangan kurikulum berbasis gender                    |
| 10 | Alfarizi & Rahman (2025) | Indonesia                 | Studi komparatif   | Pemikiran tokoh pendidikan Islam        | Pendidikan inklusif berbasis nilai agama mendukung kesetaraan gender                                               | Landasan filosofis pendidikan inklusif berbasis nilai                    |
| 11 | Hasanah & Wianti (2024)  | Indonesia                 | Filosofis          | Harmoni gender dalam pendidikan Islam   | Kesetaraan gender merupakan nilai dasar dalam pendidikan Islam                                                     | Menguatkan perspektif filosofis dan teologis                             |
| 12 | Rentzi (2024)            | Internasional (yunani)    | Studi konseptual   | Keadilan sosial dalam pendidikan        | Pendidikan multikultural kritis dapat mengatasi ketimpangan gender                                                 | Landasan teori kritis dalam pendidikan inklusif                          |

Hasil telaah menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan isu multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan pedagogis. Sebagaimana

besar studi menegaskan bahwa meskipun kebijakan telah mendukung kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks budaya patriarki dan praktik pendidikan yang bias gender. Adapun analisis mendalam disajikan melalui empat tema utama yang ditemukan dari sintesis literatur dan dianalisis dari sudut pandang filsafat pendidikan.

### **Perspektif Filsafat Pendidikan dalam Menganalisis Kesetaraan Gender**

Filsafat Pendidikan menyediakan lensa konseptual yang kuat untuk memahami dan mengkritisi ketidaksetaraan gender di Pendidikan Indonesia. Bukan hanya sebagai fenomena teknis, tetapi sebagai persoalan moral, sosial dan epistemik. Melalui lensa humanistik, kritis, progresif, dan feministik, isu gender dapat dianalisis secara komprehensif dan mendalam. Analisis literatur menunjukkan bahwa filsafat pendidikan berperan sebagai kerangka kritis untuk memahami dan mengevaluasi ketidaksetaraan gender.

Dalam pandangan humanisme, pendidikan harus memperlakukan semua siswa sebagai individu dengan hak dan martabat yang sama. Ini sejalan dengan Susan Moller Okin, yang menekankan bahwa keadilan gender adalah kebutuhan utama kemanusiaan (Bato, 2024). Pendekatan humanistik menentang hubungan kekuasaan patriarkal dan mendukung kesempatan pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Dari perspektif feminisme pendidikan, adanya penekanan kritik terhadap struktur patriarki yang melekat di semua aspek sekolah, mulai dari praktik di kelas hingga relasi gender. Feminisme hukum menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendidikan adalah hasil kebijakan dan budaya (Marita & Pramesti, 2023).

Kesetaraan gender dalam kerangka filsafat pendidikan dapat dianalisis melalui berbagai perspektif normatif dan kritis. Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, kesetaraan gender dipahami sebagai nilai ontologis yang melekat pada martabat manusia, di mana laki-laki dan perempuan diposisikan setara sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi (Anastasia et al., 2024); (Hasanah & Wianti, 2024). Pandangan ini memberikan legitimasi teologis sekaligus filosofis bagi penghapusan diskriminasi dalam pendidikan. Sejalan dengan itu, dalam tradisi filsafat pendidikan modern yang lebih universal, pendekatan humanisme dan keadilan sosial menekankan bahwa pendidikan harus menjamin kemampuan (*capabilities*) setiap individu untuk berkembang secara setara tanpa diskriminasi berbasis gender (Stewart, 2013).

Selanjutnya, dalam paradigma progresivisme, pendidikan dipandang sebagai proses transformasional yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga merekonstruksi struktur sosial yang tidak adil. Pendekatan ini relevan untuk mendekonstruksi stereotip gender dan sistem pendidikan yang membatasi partisipasi perempuan. Sementara itu pada perspektif pedagogi kritis, Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai praksis pembebasan dari struktur opresif (Freire et al., 2018). Dengan demikian, apabila kurikulum dan praktik pembelajaran masih mereproduksi stereotip gender, maka pendidikan justru berkontribusi terhadap pelanggaran ketidakeadilan.

Secara keseluruhan, filsafat pendidikan menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender adalah konstruksi sosial dan historis dan bukan fenomena alam, di mana pendidikan yang berkeadilan dapat menyelesaikannya (Larasati & Ayu, 2020). Oleh karena itu, filsafat pendidikan berfungsi sebagai mata kritis yang memungkinkan diskusi tentang nilai, tujuan, dan struktur pendidikan di luar efisiensi dan kuantitas. Oleh karena itu, berbagai perspektif filosofis baik berbasis agama maupun teori kritis secara konsisten menegaskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pembentukan lingkungan belajar yang inklusif, reflektif, dan berkeadilan gender, di mana filsafat pendidikan berfungsi sebagai mata kritis yang memungkinkan diskusi tentang nilai, tujuan, dan struktur pendidikan di luar efisiensi dan kuantitas.

## **Bentuk-Bentuk Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan Indonesia**

Tinjauan literatur empiris menunjukkan secara konsisten bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, seperti kurikulum, buku teks, representasi dalam materi ajar, dan praktik pembelajaran.

### **1. Bias Gender dalam Kurikulum dan Sumber Belajar**

Menurut sejumlah penelitian, buku teks, narasi pembelajaran, dan representasi peran sosial dalam kurikulum sekolah di Indonesia masih mengandung bias gender. Laki-laki digambarkan sebagai pemimpin, pekerja profesional, atau agen perubahan, sedangkan representasi perempuan cenderung stereotipe. Misalnya, mereka digambarkan sebagai orang rumah, pengasuh, atau pasif (Rohman, 2024). Bias seperti ini menciptakan kurikulum yang tersembunyi yang menguatkan hubungan kuasa patriarkal. Ini juga berdampak pada cara siswa melihat peran gender.

Kurikulum yang bias gender dilihat dari perspektif pedagogis feminis adalah merupakan bentuk ketidakadilan epistemik karena pengalaman dan kontribusi perempuan secara sistematis disisihkan (Hooks, 2000). Di sisi lain, perspektif kritisisme Freire memandang kurikulum yang bias gender sebagai struktur yang mengganggu yang harus didiskusikan dan diubah melalui pendidikan kritis (Freire et al., 2018).

Dalam kerangka humanisme, Kurikulum harus dirancang dengan mempertimbangkan humanisme untuk memaksimalkan potensi setiap siswa tanpa membedakan gender (Noddings, 2013). Oleh karena itu, menghentikan representasi yang tidak adil dalam materi pelajaran adalah langkah penting menuju pendidikan yang lebih adil.

### **2. Ketidaksetaraan dalam Praktik Pembelajaran dan Interaksi di Kelas**

Praktik pembelajaran seringkali dipengaruhi oleh ekspektasi sosial terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, guru lebih sering memanggil siswa laki-laki untuk menjawab pertanyaan, memberikan kesempatan lebih banyak kepada laki-laki untuk mengambil bagian dalam tugas-tugas sains atau fisik, dan memberikan tugas-tugas yang berbeda kepada siswa perempuan yang dianggap lebih sabar atau teliti (Subrahmanian, 2005) sehingga pola interaksi pedagogis tidak bersifat netral gender.

Sementara itu pada praktik pembelajaran di perguruan tinggi partisipasi perempuan meningkat, namun kesenjangan dalam pengalaman akademik tetap terjadi karena dukungan kelembagaan yang belum optimal (Yuspiani et al., 2023). Di beberapa mata pelajaran (STEM), guru cenderung lebih mendorong siswa laki-laki. Perempuan masih mengalami keterbatasan akses digital dan representasi rendah di bidang STEM (Madale et al., 2025). Menurut filsafat pendidikan kritis, ketidaksetaraan dalam interaksi pembelajaran menunjukkan hubungan kuasa yang tak kasat mata. Menurut Freire et al. (Freire et al., 2018), pendidikan seharusnya membebaskan daripada mereproduksi ketidakadilan. Di sisi lain, perspektif progresivisme Dewey menekankan betapa pentingnya pengalaman belajar demokratis, di mana setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi (Parry & Allison, 2020). Prinsip demokrasi pendidikan dilanggar ketika metode pedagogis membedakan laki-laki dan perempuan. Dari etika kepedulian (Noddings), guru memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan relasi pedagogis yang memenuhi semua kebutuhan siswa tanpa mempertimbangkan gender mereka.

### **3. Budaya Sekolah dan Lingkungan Sosial yang Mempengaruhi Gender**

Budaya sekolah berperan besar dalam mengonstruksi norma gender. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa masih terdapat sekolah yang memisahkan aktivitas berdasarkan gender, menetapkan aturan berpakaian dengan beban lebih berat pada perempuan atau mempertahankan stereotipe kelemahan perempuan dalam bidang STEM (Akmatalieva, 2022). Kegiatan

ekstrakurikuler tertentu juga dipersepsikan lebih sesuai untuk gender tertentu, misalnya robotik untuk anak laki-laki dan tari untuk anak perempuan.

Adanya budaya patriaki di sekolah dan masyarakat, di mana perempuan masih dianggap kelas dua, terutama di daerah pedesaan, dan hak pendidikan sering dikorbankan demi peran domestik (Missa et al., 2021). Pendekatan filsafat feminis berpendapat bahwa budaya sekolah sering mereproduksi norma patriarki melalui praktik keseharian. Sekolah seharusnya menjadi ruang yang membongkar, bukan mengukung ketimpangan gender.

### **Intervensi Pendidikan dan Dampaknya terhadap Kesetaraan Gender**

Di Indonesia, kesetaraan gender tidak hanya dicapai melalui perubahan kebijakan, tetapi juga melalui berbagai intervensi pendidikan yang ditujukan untuk mengurangi bias dan memastikan semua siswa memiliki akses dan pengalaman belajar yang setara. Dalam literatur, reformasi kurikulum, terutama Kurikulum Merdeka, adalah salah satu bentuk intervensi struktural yang signifikan. Profil Pelajar Pancasila (P5) dan pembelajaran berdiferensiasi ditambahkan ke dalam kurikulum ini. Mereka juga menggunakan pendekatan berbasis proyek yang menekankan kerja sama tim dan kepemimpinan tanpa diskriminasi gender. Meskipun intervensi ini dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi dalam ruang belajar, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terkait kesiapan guru dan budaya sekolah (Maela, 2024).

Pengarusutamaan Gender (PUG) bukan hanya perubahan kurikulum, tetapi juga menjadi alat kebijakan penting yang mendorong institusi pendidikan untuk memasukkan perspektif kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Studi menunjukkan bahwa meskipun PUG telah dimasukkan ke dalam peraturan pendidikan, penerapannya hanya terbatas pada tingkat administratif dan belum sepenuhnya mengubah cara pembelajaran di kelas (Larasati & Ayu, 2020). Pelatihan guru berbasis gender adalah langkah berikutnya yang diperlukan karena peran strategis guru untuk mengubah pembelajaran. Studi menunjukkan bahwa pendidik harus dilatih untuk mengidentifikasi bias gender, mengelola kelas yang inklusif, dan memilih materi ajar yang tidak stereotip. Pola interaksi di kelas, kepercayaan diri siswa perempuan, dan keterlibatan mereka dalam STEM secara langsung dipengaruhi oleh kemampuan guru untuk menerapkan pedagogi sensitif gender (Madale et al., 2025); (Adib & Nurwahidah, 2024).

Penggunaan pendekatan multikultural kritis dan interseksional adalah intervensi lain yang sedang berkembang. Pendekatan ini menekankan betapa pentingnya pendidikan menghargai keragaman identitas serta membongkar struktur penindasan yang didasarkan pada gender, budaya, dan kelas sosial. Pendekatan ini dianggap dapat menciptakan ruang belajar yang lebih demokratis dan reflektif bagi siswa (Rentzi, 2024). Sementara itu, digitalisasi pendidikan telah menghasilkan program pemberdayaan perempuan melalui peningkatan literasi digital dan akses yang lebih adil ke teknologi pendidikan. Hal ini menjadi sangat penting karena perempuan di banyak tempat masih mengalami kesenjangan digital (Madale et al., 2025).

Secara keseluruhan, intervensi dalam pendidikan baik struktural, pedagogis, maupun teknologi menunjukkan arah progresif menuju kesetaraan gender. Namun, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi sangat bergantung pada kesiapan kultur sekolah dan seberapa besar internalisasi nilai-nilai keadilan gender dari pendidik. Jadi, agar pendidikan berkeadilan gender dapat berjalan secara sistemik dan berkelanjutan, kebijakan, guru, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapainya.

## **Implikasi Teoritis dan Praktis bagi Pengembangan Pendidikan Berkeadilan Gender**

Secara teoretis, studi kesetaraan gender menuntut pemahaman bahwa gender adalah konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya, norma, dan praktik pendidikan yang berulang, dan bahwa pengembangan pendidikan berkeadilan gender memiliki dampak yang signifikan secara praktis dan teoretis. Pemahaman ini diperkuat oleh temuan bahwa stereotip gender dalam kurikulum, buku teks, dan budaya sekolah membentuk batasan identitas yang menghambat perkembangan peserta didik perempuan maupun laki-laki (COJOCARU et al., 2025). Sehingga pendidikan perlu mengintegrasikan kerangka filosofis yang lebih humanis, feminis, dan emansipatoris untuk membangun teori pendidikan yang tidak lagi netral gender, tetapi secara eksplisit menolak ketidaksetaraan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan yang ditegaskan (Bato, 2024) dan (Bala, 2019) bahwa keadilan gender adalah fondasi moral untuk pendidikan yang memanusiakan, sehingga teori pendidikan harus didasarkan pada nilai kesetaraan, keadilan distributif, dan pengakuan terhadap martabat setiap siswa.

Pada tingkat praktis, konsekuensi ini membutuhkan perubahan sistemik dalam kurikulum dan pedagogi. Kurikulum harus diubah untuk menghilangkan stereotip gender dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki direpresentasikan secara adil dan kontekstual dalam peran sosial, profesi, dan narasi sejarah. Sebagai bagian penting dari proses pembelajaran, pendidik harus diberi pelatihan khusus tentang pedagogi sensitif gender agar mereka dapat menemukan dan mengatasi bias dalam interaksi kelas (Klein, 1985). Selain itu, budaya sekolah harus diubah menjadi lingkungan yang inklusif yang mendorong semua siswa untuk berpartisipasi aktif. Agar semua siswa mendapatkan pengalaman pendidikan yang setara, kebijakan sekolah, seperti aturan perilaku, aktivitas ekstrakurikuler, dan kepemimpinan siswa, harus menghormati keadilan gender. Selain itu, untuk mengatasi tantangan struktural dan kultural yang terkait dengan dominasi patriarki, upaya ini harus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, sekolah, orang tua, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan (Anastasia et al., 2024).

Secara keseluruhan, hasil teoretis dan praktis ini menunjukkan bahwa pendidikan berkeadilan gender merupakan transformasi paradigma yang menyentuh pemahaman kita tentang manusia, nilai, dan tujuan pendidikan. Ini memerlukan perubahan perspektif, struktur, dan praktik, sehingga prinsip kesetaraan diterapkan dalam semua aspek kehidupan.

## **Penutup**

### **1. Simpulan**

- a. Kesetaraan gender dalam Pendidikan Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek filosofis, pedagogis, dan struktural, serta dipengaruhi oleh kurikulum, praktik pembelajaran, dan budaya sekolah.
- b. Dari perspektif filsafat pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan gender adalah persoalan moral dan sosial yang bersifat struktural, bukan sekedar masalah teknis atau administratif.
- c. Kajian literatur menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih tampak dalam bias representasi buku teks, stereotip kurikulum, kesenjangan partisipasi peserta didik, bias interaksi guru dan siswa, dan budaya sekolah yang dipengaruhi norma patriarkal.
- d. Filsafat humanisme, feminisme, progresivisme, dan pendidikan kritis memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami dan menanggulangi ketidaksetaraan gender melalui transformasi pendidikan.
- e. Pendidikan berkeadilan gender hanya dapat dicapai melalui perubahan yang simultan dan berkelanjutan pada level paradigma dan nilai, praktik pedagogis, serta kebijakan dan budaya sekolah

## 2. Saran/rekomendasi

- a. Kebijakan pendidikan perlu mengintegrasikan perspektif filosofis dan keadilan gender secara lebih eksplisit agar tidak berhenti pada pendekatan administratif semata.
- b. Pendidik dan sekolah disarankan mengembangkan praktik pembelajaran yang reflektif dan inklusif gender melalui pelatihan guru dan evaluasi berkelanjutan terhadap praktik kelas.
- c. Pengembangan kurikulum dan buku teks perlu dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan bias gender, termasuk dengan mengkaji *hidden curriculum* yang berpotensi mereproduksi stereotip.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian empiris dan kontekstual berbasis lokal untuk memperkuat implementasi pendidikan berkeadilan gender di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adib, M. A., & Nurwahidah. (2024). Gender Equality and Fulfillment of Human Rights in the Education System in Indonesia. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 2(3), 105–114. <https://doi.org/10.59923/spiritus.v2i3.199>
- Akmatalieva, N. (2022). Gender Equality In Education. *Alatoo Academic Studies*, 22(2), 408–417. <https://doi.org/10.17015/aas.2022.222.52>
- Anastasia, Nurhuda, A., Aziz, T., & Hasan Ansori, I. (2024). Gender Equality In The Perspective Of Islam And Education In Indonesia. *Jurnal Armada Pendidikan*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.60041/jap/v2i1.53>
- Azizah, N. (2023). Gender Equality Challenges and Raising Awareness in the Patriarchal Cultural in Indonesia. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 47–2. <https://doi.org/10.32996/jhss>
- Bala, P. (2019). Feminism: an Overview. *Smart Moves Journal Ijellh*, 7(12), 8. <https://doi.org/10.24113/ijellh.v7i12.10227>
- Bato, K. (2024). Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam Lensa Filsafat: Dilema Etika dan Implementasi. *Proceedings Of The National Conference On Indonesian Philosophy And Theology “Filsafat Kontekstual Indonesia,”* 483–506. <https://doi.org/10.24071/snf.v2i2.8517>
- Bodin, J. (2020). Youth Perceptions of Gender-Based Violence in The Central African Republic. *Plan Internasional*, 5(1), 1–5.
- Cojocaru, S., Bunea, O., Cojocaru, D., Neculau, C., & Patrascu, A. A. (2025). Gender Equality. Conditions for Ensuring Gender Equality in Education. In *Gender Equality. Conditions for Ensuring Gender Equality in Education*. Expert Projects. <https://doi.org/10.33788/qie.25.02>
- Freire, Paulo., Ramos, M. Bergman., Macedo, D. P., & Shor, Ira. (2018). *Pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury Academic.
- Hasanah, U., & Wianti, N. I. (2024). Gender Harmony in Islamic Education: A Philosophical Perspective. *Al Huwiyah Journal of Woman and Children Studies*, 4(2), 136–147.
- Hooks, Bell. (2000). *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics*. South End Press.
- Klein, S. S. (1985). *Handbook for Achieving Sex Equity through Education*. Johns Hopkins University.
- Larasati, A. M., & Ayu, N. P. (2020). The Education for Gender Equality and Human Rights in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 73–84. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37321>

- Madale, V. A., Silor, A. C., Dinoro, A. P., Adil, J. J. G., & Salic-Hairulla, M. A. (2025). Gender Equality in Education: Mapping Challenges, Innovations, and Unexplored Dimensions. In *Seminars in Medical Writing and Education* (Vol. 4). AG Editor (Argentina). <https://doi.org/10.56294/mw2025781>
- Maela, S. N. (2024). Analisis Kurikulum Merdeka dalam Perspektif Gender : Tinjauan Epistemologi Siti Nur Maela. *Journal on Education*, 06(04), 21293–21305.
- Marita, M., & Pramesti, Y. P. (2023). Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia. *Journal of Transcendental Law*, 5(2), 82–90. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>
- Missa, A., Suparlim, M. I., & Lumingkewas, M. S. (2021). Indonesian Gender Justice In School Education. *PERUM: Journal of Biblical Practice*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.130>
- Muhammad. (2025). Isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Serta Tantangan Dan Solusi. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 51–61.
- Noddings, N. (2013). *Caring A Relational Approach to Ethics & Moral Education* (second edition). University of California Press.
- Parry, S. J., & Allison, Pete. (2020). *Experiential learning and outdoor education : traditions of practice and philosophical perspectives*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Rentzi, A. (2024). Social Justice in Education: Creating an Inclusive Culture at Schools Through Critical Multicultural Theory. *European Journal of Education and Pedagogy*, 5(1), 94–97. <https://doi.org/10.24018/ejedu.2024.5.1.802>
- Rohman, D. F. (2024). Analisis Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan YASPIA Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 30278–30286.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stewart, F. (2013). Nussbaum on the Capabilities Approach. *Journal of Human Development and Capabilities*, 14(1), 156–160. <https://doi.org/10.1080/19452829.2013.762175>
- Subrahmanian, R. (2005). Gender equality in education: Definitions and measurements. *International Journal of Educational Development*, 25(4 SPEC. ISS.), 395–407. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.04.003>
- Sulistyowati, Y. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial. *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14.
- Tue, F., Hartini Melo, R., Samatowa, L., Magister Pendidikan Geografi Universitas Negeri Gorontalo, P., & Ilmu Lingkungan FMIPA Universitas Negeri Gorontalo, J. (2024). Peran Pendidikan Dalam Mendorong Kesetaraan Gender Di Masyarakat. *Jurnal Normalita*, 12, 218–223.
- UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. <http://www.unesco>.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development Preamble*.
- Yuspiani, Y., Naro, W., & Goncing, A. (2023). Higher Education And Gender Equality: Case Study Of State University Students In Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 26(1), 182–199. <https://doi.org/10.24252/lp.2023v26n1i13>